

Judul : DPR Evaluasi Otda, tuntut kemandirian fiskal daerah
Tanggal : Kamis, 30 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Evaluasi Otda, Tuntut Kemandirian Fiskal Daerah

Kalangan anggota DPR mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang sudah berjalan selama 30 tahun ini. Pasalnya, hingga kini masih ada daerah yang tidak kunjung mandiri secara fiskal.

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, tidak sedikit daerah menghadapi kendala serius, terutama wilayah hasil pemekaran. Daerah itu masih bergantung pada Pemerintah Pusat, baik sisi fiskal maupun kapasitas kelembagaan.

Ketertinggalan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat harus jadi perhatian serius semua pihak terkait. Selama tiga dekade, kemajuan memang ada, tapi tetap belum merata.

"Kondisi itu harus segera dievaluasi untuk memastikan keberhasilan program desentralisasi yang telah berjalan cukup lama tetap relevan," ucap Khozin, di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Khozin mengingatkan Pemerintah Pusat agar tetap melakukan pengawasan serius terhadap daerah tertinggal dan hasil pemekaran. Pemerintah Pusat tidak boleh melepas daerah begitu saja tanpa pendampingan. Harus ada pembinaan terarah bagi wilayah yang saat ini masih cenderung berjalan di tempat.

Semangat otonomi, kata dia,

seharusnya mendorong kemandirian, bukan justru memperpanjang ketergantungan daerah pada pusat. Desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan, melainkan juga distribusi tanggung jawab. Daerah harus memiliki keberanian untuk membangun kemandirian fiskal serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Tiga dekade otonomi, lanjutnya, harus jadi momentum konsolidasi, bukan sekadar evaluasi administratif rutin semata. Karena masalah utama kini bukan pada desain kebijakan, melainkan implementasi yang belum konsisten dan berorientasi hasil. "Butuh langkah nyata untuk memperbaiki sistem agar tujuan utama desentralisasi segera tercapai," tegasnya.

Kemandirian, sambung Khozin, harus diwujudkan lewat kemampuan menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan. Inovasi pelayanan publik dan keberanian mengambil kebijakan strategis berbasis kebutuhan lokal sangat dibutuhkan. Daerah tidak bisa hanya memak-



Muhammad Khozin

nai otonomi sebagai kebebasan mengelola anggaran tanpa adanya usaha produktif.

Menurutnya, Pemda perlu menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola bersih, profesional, dan akuntabel. Tanpa hal itu, otonomi hanya akan jadi ruang desentralisasi masalah di wilayah mereka. Integritas para pemimpin lokal sangat menentukan apakah daerah itu mampu berkembang atau justru mengalami kemunduran.

Untuk Pemerintah Pusat, dia mendorong mengubah pendekatan dari pengawasan administratif jadi pembinaan berbasis kinerja yang terukur. Daerah tertinggal dan hasil pemekaran harus didampingi secara intensif dengan

target jelas. Pendekatan baru itu diharapkan mampu memacu percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal.

Ketua Komisi II DPR Rifqinzamy Karsayuda menambahkan, di awal Otda sempat melahirkan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah. Fenomena itu adalah dengan munculnya raja-raja kecil di daerah. Kondisi itu terjadi ketika daerah memperoleh kewenangan sangat besar, sementara pusat hanya memegang sisa kewenangan.

Besarnya kewenangan tersebut ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Pengalaman pahit itu jadi pelajaran bagi Pemerintah dalam menata ulang hubungan pusat dan daerah. Hubungan yang tidak seimbang terbukti gagal membawa kemajuan signifikan bagi pembangunan manusia di daerah.

Pemerintah Pusat kemudian memperkuat peran dan kewenangannya untuk menjaga keseimbangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Porsi kewenangan dan keuangan pusat hari ini jauh lebih besar dari sebelumnya. "Kebijakan itu diambil berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman

buruk pemberian otonomi pada masa lalu," terangnya.

Rifqi menekankan, penguatan peran Pemerintah Pusat tidak boleh mengarah pada sentralisasi yang berlebihan bagi daerah. Keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah tetap harus dijaga agar otonomi berjalan efektif. Sentralisme yang terlalu kuat tidak baik bagi perkembangan kreativitas dan inovasi di tingkat lokal.

Menurutnya, daerah perlu terus meningkatkan kapasitas serta kemandirian, termasuk dalam pengelolaan keuangan mereka secara mandiri. Saat ini, 90 persen daerah masih bergantung pada APBN melalui transfer keuangan. Ketergantungan tinggi itu menunjukkan bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli yang mereka miliki.

Karena itu, dia mendorong Pemda mengembangkan sumber pendapatan alternatif agar tidak selalu bergantung pada transfer dana dari pusat. Kemandirian fiskal akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi daerah untuk membiayai pembangunan.

"Itu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan esensi otonomi yang sebenarnya bagi masyarakat," ujarnya. ■ PYB